



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARINRINGI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 269909

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.030.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/234 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/126 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 878 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 692 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/290 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 4.752 m2/996 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **205.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2005, WARISAN Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **45.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **282.542.490**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

3.562.542.490

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.562.542.490

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.